



---

## Efektivitas Implementasi Kebijakan BDC Program Kotaku Dalam Memberdayakan UMKM di Kabupaten Pangandaran

Hairin Nur<sup>1)</sup>\*, Lisman Manurung<sup>2)</sup>, Made Yudhi Setiani<sup>3)</sup>

<sup>1),2),3)</sup> Magister Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Terbuka, Indonesia

Disetujui: Oktober 2023; Direview: Oktober 2023; Diterima: Desember 2023

---

### Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan BDC Program Kotaku dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Pangandaran. Jenis penelitian ini, adalah campuran deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan instrumen (kuesioner) kepada responden, selanjutnya dianalisis dengan tehnik analisis statistik deskriptif menggunakan rumus persentase untuk mengukur nilai efektivitas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Business Development Centre merupakan salah satu kegiatan dari Program P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2015 dengan pendekatan fasilitasi layanan kegiatan ekonomi terhadap KSM Ekonomi binaan program. Selanjutnya P2KKP bertransformasi menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan lebih fokus pada pendekatan fasilitasi infrastruktur masyarakat maka pendekatan fasilitasi terhadap BDC pun berubah menjadi fasilitasi infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan BDC Program Kotaku Dalam Memberdayakan UMKM termasuk kategori BAIK, dilihat dari aspek tepat proses, tepat target, tepat kebijakan dan tepat lingkungan. Pemberdayaan KSM juga berjalan efektif dan masuk termasuk dalam kategori baik. Pembangunan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM diharapkan menjadi solusi terhadap terbatasnya lapangan kerja.

**Kata Kunci:** Kebijakan, UKM, BDC, Pemberdayaan

### Abstract

*The aim of the research is to analyze the effectiveness of implementation of the BDC policy of the KOTAKU Program in empowering UMKM in Pangandaran regency. This kind of research is a mixed of descriptive quantitative dan qualitative. Sample used as many as 100 respondents. Data collection is carried out by distributing the instrument (questioner) to the respondents, then analysed with the technique of descriptive statistics analysis using a percentage formula to measure the value of effectiveness. The results of this research found that the Business Development Centre was one of the activities of the P2KKP (Programme for Improving the Quality of Residential Areas) which was launched by the Directorate-General for Human Settlements of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) in 2015 with the approach of facilitating the services of economic activities to the KSM Economy of the program. The effectiveness of implementation of the BDC Policy Program in enabling UMKM includes the category of good, seen from the aspects of process, target, policy and environment. Enabling KSM also runs effectively and is included in the good category. The development of the economy of the community through the empowerment of UMKM is expected to be a solution to the limited employment.*

**Keywords:** Policy, SMEs, BDCs, Empowerment

**How to Cite:** Nur, H., Manurung, L. & Setiani, M.Y. (2023). Efektivitas Implementasi Kebijakan BDC Program Kotaku Dalam Memberdayakan UMKM di Kabupaten Pangandaran. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Vol (11), No. 2 : 136-147

\*Corresponding author:

E-mail: [hairin.nur@gmail.com](mailto:hairin.nur@gmail.com)

ISSN 2549-9165 (Print)

ISSN 2580-2011 (Online)

## PENDAHULUAN

UMKM menjadi salah satu penyokong perekonomian Indonesia di mana menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,39 triliun rupiah pada tahun 2020 serta kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun 60,4% dari total nilai investasi yang ada.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing. Persoalan utama yang paling sering dihadapi oleh UMKM adalah terkait dengan perizinan dan kualitas produk. Permasalahan mendasar lain yang seringkali dihadapi para pelaku UMKM di antaranya adalah rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh banyak hal seperti rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM, terbatasnya akses permodalan, pengelolaan produk yang masih bersifat tradisional dan manual, akses informasi dan pasar yang terbatas serta kurangnya jejaring pemasaran dan faktor – faktor lainnya. Pembangunan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM diharapkan menjadi solusi terhadap terbatasnya lapangan kerja, apalagi di masa pandemic Covid 19 ini di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan. UMKM menjadi salah satu harapan masyarakat untuk bertahan di masa krisis walaupun terjadi penurunan pemasukan dan omset selain tetap tumbuhnya kebutuhan masyarakat walaupun daya beli menurun.

Dalam rangka membantu UMKM dalam menghadapi permasalahannya Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan. Salah satunya adalah, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginisiasi **Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)** sebagai salah satu pembangunan platform kolaborasi. Program KOTAKU mendorong Pemerintah Daerah menjadi pelaku utama dalam penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni. Kebijakan Pemerintah Pusat berupa Program KOTAKU merupakan salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rangka menyikapi perubahan paradigma dan kebijakan baru dari pemerintah pusat. Basis dari program

KOTAKU adalah program **PNPM Mandiri Perkotaan** yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals (MDGs)*. Transisi pemerintahan pusat turut berimplikasi pada transisi program. PNPM Mandiri Perkotaan yang menggunakan pendekatan penanggulangan kemiskinan dengan konsep tridaya yaitu penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial mengalami transisi menjadi program P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman) pada tahun 2015 sebagai program *bridging* di mana konsep pendekatannya adalah pembangunan ekonomi di skala kota dan pendekatan perbaikan infrastruktur dalam rangka penanganan Kawasan kumuh di perkotaan. Program Pilot BDC ini diluncurkan pada masa pelaksanaan program P2KKP. Selanjutnya Program P2KKP ini bertransformasi menjadi program KOTAKU, seperti ditunjukkan pada bagan I.1 di bawah ini.



**Gambar 1. Transformasi Program KOTAKU**

Program KOTAKU (*National Slum Upgrading Program (NSUP)*) diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan *Islamic Development Bank (IsDB)*, *World Bank (WB)* serta *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*.

Kegiatan usaha kecil yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat secara bertahap telah berkembang dengan fasilitasi program KOTAKU semenjak program ini bernama P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) antara lain produk atau jasa unggulan daerah (misalkan batik, kerajinan, alas kaki dll). Sebagian usaha masyarakat tersebut berpotensi untuk dapat

dikembangkan basic secara kualitas produknya, pasarnya dll, apabila didukung untuk melakukan jejaring dan kerjasama usaha di tingkat lebih luas, khususnya tingkat Kota/Kabupaten apalagi bila sejalan dan sinergis dengan kebijakan pemerintah daerah setempat dalam mengembangkan produk-produk unggulan di wilayahnya akan menjadi sangat produktif. Atas dasar hal tersebut melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dikembangkan program Pilot Pengembangan Usaha di tingkat Kota/Kabupaten atau *Business Development Centre (BDC)* dalam rangka mendukung pengembangan usaha masyarakat dalam UMKM agar dapat lebih produktif dan semakin meningkat.

*Business Development Center (BDC)* merupakan kebijakan pemerintah pusat yang menjadi salah satu sub kegiatan dalam Program KOTAKU di wilayah *Islamic Development Bank (IsDB)* terkait dengan dukungan peningkatan penghidupan masyarakat. BDC di tingkat kabupaten/kota berfokus pada pengembangan produk unggulan atau usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan pendampingan berkelanjutan pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pangandaran sebagai Kabupaten yang penuh potensi merupakan salah satu Kota/Kabupaten yang melaksanakan kegiatan *Pilot BDC* ini. Perkembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Pangandaran yang semakin pesat membawa implikasi terhadap iklim kompetisi yang semakin ketat. Akibatnya, bagi industri kecil dan menengah yang tidak mampu berkompetisi akan tergusur dari persaingan usaha dan terancam bangkrut. Upaya untuk menjadikan industri kecil dan menengah agar mampu berkompetisi, mandiri dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Pangandaran tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Demikian halnya KSM Ekonomi dalam program KOTAKU mau tidak harus berhadapan dengan persaingan yang sama sehingga melalui kegiatan BDC ini diharapkan menjadi salah satu media bagi KSM - KSM di Kabupaten Pangandaran agar mampu

beradaptasi dengan persaingan usaha yang cukup sengit tersebut. Kabupaten Pangandaran yang potensi kreativitasnya yang sangat tinggi turut pula menjadi salah satu tantangan bagi KSM - KSM agar mampu menjawab hal tersebut. BDC berdiri dalam rangka membantu KSM dalam meningkatkan skala produksi KSM, kualitas produknya dan pemasaran yang lebih luas. Menyangkut implementasi kebijakan publik, setiap kebijakan publik tidak otomatis terlaksana sebagaimana diharapkan. Merujuk pada Pressman dan Wildavsky yang dikutip oleh (Howlett and Ramesh, 2003) birokrasi pemerintahan tidak selalu menerapkan kebijakan sebagaimana diharapkan, namun tidak lepas dari mind set para pelaksana di lapangan (Manurung, 2007). Berkenaan dengan implementasi kebijakan publik terkait dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pengembangan ekonomi rakyat, khususnya koperasi, usaha kecil dan menengah, maka upaya peningkatan penghidupan masyarakat dalam kerangka pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) serta pengembangannya harus memperhatikan kewenangan Pemerintah Kab/Kota sehingga dapat meningkatkan efektifitas kolaborasi yang merupakan platform program KOTAKU. BDC sebagai salah satu komponen kegiatan KOTAKU yang sebenarnya sudah ada sejak program KOTAKU masih bernama P2KKP merupakan salah satu fokus kegiatan yang penanganan dan keberlanjutannya diarahkan pada PEMDA selaku leading sektor

Berkenaan dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pengembangan ekonomi rakyat, khususnya koperasi, usaha kecil dan menengah, maka upaya peningkatan penghidupan masyarakat dalam kerangka pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) serta pengembangannya harus memperhatikan kewenangan Pemerintah Kab/Kota sehingga dapat meningkatkan efektifitas kolaborasi yang merupakan platform program KOTAKU. BDC sebagai salah satu komponen kegiatan KOTAKU yang sebenarnya sudah ada sejak program KOTAKU masih bernama P2KKP merupakan salah satu fokus kegiatan yang penanganan dan keberlanjutannya diarahkan pada PEMDA selaku *leading sector*.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan BDC dalam mengembangkan produk unggulan daerah yang berasal dari pelaku usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) tidak hanya bertumpu pada KSM semata tetapi seluruh *stakeholder* terkait harus bahu membahu bekerjasama dengan segala potensinya untuk menjadikan kegiatan ini berjalan dengan baik dan tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha KSM yang diharapkan akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dapat tercapai. Keberadaan BDC diharapkan menjadi jembatan untuk secara bertahap membantu UMKM mengatasi persoalan – persoalan tersebut di atas. Seperti yang disampaikan oleh Sudaryanto dan (Hanin, 2002), kendala pengembangan UMKM di antaranya adalah modal yang terbatas, sumber daya manusia yang rendah, minimnya penguasaan pelaku UMKM terhadap pengetahuan dan teknologi.

Cakupan wilayah Binaan BDC saat ini adalah Desa/Kelurahan yang termasuk dalam program KOTAKU sehingga secara langsung berakibat BDC belum begitu dikenal oleh Pelaku UMKM di luar wilayah pelaksanaan program KOTAKU, sebenarnya Komite dan Pengelola BDC pernah mengajukan agar dapat juga memfasilitasi pelaku UMKM di luar wilayah Program KOTAKU hanya saja belum mendapatkan persetujuan dan lebih diutamakan untuk melayani pelaku UMKM yang ada dalam wilayah Program KOTAKU.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat campuran deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah menyajikan data untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data dalam bentuk tabel dan grafik untuk pengukuran terhadap fenomena tertentu.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer digali langsung melalui kegiatan survei di lokasi penelitian serta wawancara terhadap pelaku UMKM baik yang pernah mendapatkan fasilitasi BDC maupun belum dengan tujuan untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin untuk kepentingan penelitian. Selain itu juga dilakukan *indepth interview* baik kepada Dinas terkait maupun pelaku program untuk

mendapatkan informasi tentang berjalannya program BDC di Kabupaten Pangandaran. Data sekunder didapatkan melalui berbagai sumber terkait baik dari Dinas terkait maupun para pelaku program lainnya untuk melengkapi data penelitian.

Untuk tahap penelitian kuantitatif ini, penulis memilih responden dari pelaku usaha yang berkegiatan dalam pelaksanaan pilot BDC di Kabupaten Pangandaran. Responden yang dipilih adalah sebanyak 100 responden.

**Tabel 1. Jumlah dan Kategori UMKM di Kabupaten Pangandaran**

Kategori	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Mikro	10.371	95%
Kecil	511	5%
Menengah	0	0%
Total	10.882	100%

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran

Dalam menentukan jumlah sampel dari populasi, peneliti berpijak pada pendapat Fraenkel & Wallen dan Yount. Jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 100 (seratus) pelaku UMKM sesuai dengan pendapat Fraenkel & Wallen dalam Amiyani (2016;06) bahwa untuk penelitian deskriptif sampelnya adalah 100 orang. Demikian halnya Yount (1999) dalam Jamaluddin Ahmad (2015) menyatakan bahwa sample untuk populasi > 10.000 orang adalah 1%.

**Tabel 2. Penentuan Besarnya Sampel**

Besarnya Populasi	Besar Sampel
0 – 100	100 %
101 – 1.000	10 %
1.001 – 5.000	5 %
5.001 – 10.000	3 %
> 10.000	1 %

Selanjutnya dilakukan penentuan sampel untuk masing masing kategori usaha dengan menggunakan metode *Proportionate Stratified Random Sampling (SRS)* seperti ditunjukkan pada table 3.3. Adapun rumus untuk menentukan sampel dari masing – masing kategori menurut Akdon dan Ridwan (2008:250) adalah sebagai berikut :

$$n_i = \frac{N_i \times n}{N}$$

Keterangan :

$N_i$  = Jumlah populasi secara stratum

$N$  = Jumlah populasi seluruhnya

$n$  = Jumlah sampel seluruhnya

$n_i$  = Jumlah sampel menurut stratum

**Tabel 3. Alokasi Sampel Pelaku UMKM**

Kategori	Populasi	Sampel	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Mikro	10.371	$\frac{10.371}{10.882} \times 100 = 95$ (pembulatan)	95%
Kecil	511	$\frac{511}{10.882} \times 100 = 5$ (pembulatan)	5%
Menengah	0	0	0%
Total	10.882	100	100%

Nara sumber penelitian yang akan dilakukan juga terdiri dari informan yang berkegiatan dan/atau terkait dengan pelaksanaan program pilot BDC di Kabupaten Pangandaran. Untuk informan penelitian ini terdiri atas:

1. Kepala Bidang Perekonomian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran;
3. Ketua Komite BDC Kabupaten Pangandaran
4. Anggota Komite BDC Kabupaten Pangandaran (2 orang)
5. Pengelola BDC Kabupaten Pangandaran
6. Konsultan Pendamping Pelaksanaan BDC Kabupaten Pangandaran (6 orang)

Adapun dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data adalah peneliti sendiri atau disebut *human instrumen*. Sedangkan alat yang digunakan di antaranya pedoman observasi dan dokumentasi, wawancara, dan angket. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan terkait dengan kisi-kisi dari instrument pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Setiap penelitian yang menggunakan instrument penelitian harus diuji terlebih dahulu ketepatan instrumennya, termasuk penggunaan kuesioner atau angket harus diuji terlebih dahulu untuk memastikan bahwa

kuesioner yang digunakan memang layak untuk penelitian. Uji kuesioner ini menggunakan uji validitas dan reabilitas.

### 1. Uji Validitas

Uji validitas akan menentukan apakah suatu alat ukur memenuhi fungsi pengukurannya. Validitas menunjukkan kebenaran dan keakuratan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Uji validitas penelitian ini menggunakan korelasi *product-moment*, dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan keakuratan data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun & Sofyan, 1995).

Untuk penelitian ini, penulis memilih 30 responden pelaku UMKM dengan lokus yang sama di Kabupaten Pangandaran. Dari hasil uji validitas, apabila nilai  $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$ , maka instrument tersebut dinyatakan valid Untuk menghitung  $r_{hitung}$ , menggunakan korelasi *Product Moment Pearsons* dengan bantuan *software SPSS (Statistical Product and Service Solutions)* versi 22 dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{(N \sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 (\sum X)^2] [N \sum Y^2 (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

R = Nilai Korelasi *Product Moment*

N = Jumlah Responden

X = Jawaban dari indikator item pertanyaan

Y = Total jawaban dalam satu variabel

Sementara itu untuk menghitung nilai  $r_{tabel}$  menggunakan rumus sebagai berikut:

$$df = n - 2$$

Keterangan :

$d(f) = \text{degree of freedom ( } r_{tabel} \text{ )}$

$n$  = jumlah responden

Untuk nilai  $r_{tabel}$  dari responden 30 orang signifikansi 5% (0,05) adalah **0.361**. Sesuai dengan rumus validitas di atas maka hasil uji validitas instrument penelitian ini menggunakan aplikasi *spss* versi 22 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel X**

Variabel	Item	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Hasil
Tepat Kebijakan (X1)	X1.1	0,556	0,361	Valid
	X1.2	0,715	0,361	Valid
Tepat Pelaksana (X2)	X2.1	0,757	0,361	Valid
	X2.2	0,740	0,361	Valid
	X2.3	0,569	0,361	Valid
	X2.4	0,630	0,361	Valid
Tepat Target (X3)	X3.1	0,779	0,361	Valid
	X3.2	0,859	0,361	Valid
Tepat Lingkungan (X4)	X4.1	0,851	0,361	Valid
	X4.2	0,871	0,361	Valid
	X4.3	0,717	0,361	Valid
Tepat Proses (X5)	X5.1	0,499	0,361	Valid
	X5.2	0,579	0,361	Valid
	X5.3	0,667	0,361	Valid
	X5.4	0,578	0,361	Valid
	X5.5	0,550	0,361	Valid
	X5.6	0,634	0,361	Valid
	X5.7	0,754	0,361	Valid
	X5.8	0,814	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Dari hasil tersebut di atas maka seluruh pernyataan instrument dari semua variable x dinyatakan valid. Hasil dari uji statistiknya memenuhi syarat untuk dinyatakan valid karena **r<sub>hitung</sub> > nilai r<sub>tabel</sub>**.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel Y**

Variabel	Item	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Hasil
Pemberdayaan UMKM (Y)	Y1	0,697	0,361	Valid
	Y2	0,623	0,361	Valid
	Y3	0,717	0,361	Valid
	Y4	0,554	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Demikian halnya dengan variabel Y, dari hasil uji validitas menggunakan rumus korelasi *Product Moment Pearsons* seperti yang ditunjukkan tabel di atas, maka pernyataan – pernyataan variabel Y dinyatakan valid karena **r<sub>hitung</sub> > nilai r<sub>tabel</sub>** setelah diujicoba kepada 30 responden.

**2. Uji Reliabilitas**

Untuk melihat konsistensi suatu instrument dalam mengukur gejala yang sama walaupun digunakan beberapa kali dengan responden yang berbeda, maka instrument tersebut harus reliabel. Instrumen penelitian yang reliabel berarti dapat dipercaya dan diandalkan (Arikunto,2012:221). Untuk menguji keandalan dari instumen penelitian ini digunakan rumus *Alpha Cronbach*, sebagai berikut:

$$\alpha = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum s_t^2}{s^2} \right)$$

Suatu item dalam pernyataan dianggap reliabel bila memiliki nilai *Alpha Cronbach* > 0,60. Untuk mengetahui apakah koefisien reliabilitasnya signifikan atau tidak maka dapat menggunakan tingkat reliabilitas instrument penelitian sebagai berikut:

**Tabel 7. Tingkat Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Koesien r	Interpretasi
0,800 sampai dengan 1,00	Tinggi
0,600 sampai dengan 0,800	Cukup
0,400 sampai dengan 0,600	Agak Rendah
0,200 sampai dengan 0,400	Rendah
0,000 sampai dengan 0,200	Sangat Rendah

Sumber: Data Sekunder, diolah (Arikunto)

Penelitian ini menggunakan aplikasi *spss* versi 22 untuk menguji reliabiitas instrument penelitian dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Hasil
Tepat Kebijakan (X1)	0,667	Reliabel Cukup
Tepat Pelaksana (X2)	0,754	Reliabel Cukup
Tepat Target (X3)	0,845	Reliabel Tinggi
Tepat Lingkungan (X4)	0,831	Reliabel Tinggi
Tepat Proses (X5)	0,757	Reliabel Cukup
Pemberdayaan UMKM (Y)	0,752	Reliabel Cukp

Sumber: Data Primer, diolah



Hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan menunjukkan hasil lebih dari 0,60, artinya semua pernyataan yang diujikan dalam kuesioner dapat diandalkan sehingga dapat digunakan untuk penelitian ini. Untuk tahap penelitian kuantitatif, Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan cara menyebar angket berupa kuesioner. Kuesioner adalah kumpulan beberapa kuesioner tersebut selain menggali data tentang identitas responden juga menggali pendapat dan persepsi responden terhadap pernyataan – pernyataan yang telah ditentukan penulis sebelumnya.

Penulis menggunakan skala *likert* untuk mengukur pendapat dan persepsi dari responden atas pernyataan – pernyataan yang ada dalam kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2017) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

Setiap pernyataan oleh penulis diberikan skor untuk mempermudah penilaian dalam mengolah data dari hasil kuesioner. Adapun skala penilaian yang telah ditentukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Skor Jawaban Kuesioner**

Sikap Responden	Skor
SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	1
TIDAK SETUJU (TS)	2
NETRAL (N)	3
SETUJU	4
SANGAT SETUJU	5

Setelah data dari lokasi penelitian selesai dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data melalui proses *Editing Data* (penyuntingan data), *Coding Data* (pengkodean data) dan *Tabulasi data*. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan data dalam bentuk tabel dan grafik untuk pengukuran terhadap fenomena tertentu.

Adapun untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini adalah rumus efektivitas menurut (Satries, 2011) yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

Interpretasi hasil prosentase mengacu kepada tabel yang dikembangkan oleh Arikunto (1998) seperti dikutip dalam (Satries, 2011) sebagai berikut:

**Tabel 9. Interpretasi Nilai Efektivitas**

Besar Nilai Efektivitas	Nilai Interpretasi Efektivitas
80% - 100	Tinggi
60% - 79,9%	Cukup
40% - 59,9%	Agak Rendah
20% - 39,9%	Rendah
0% - 19,9%	Sangat Rendah

Sumber: Arikunto dalam Satries (2011)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tepat Kebijakan

Berdasarkan hasil dari tabulasi data dari 100 responden terhadap variabel tepat kebijakan (X1) menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,4 dan tingkat pencapaiannya adalah mencapai 87,0% sehingga termasuk dalam kategori BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden kebijakan BDC sesuai dengan kebutuhan UMKM di Kabupaten Pangandaran. Hal ini juga didukung dari hasil sub variabelnya baik tentang kesesuaian dengan kebutuhan UMKM (X1.1) yang menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,66 dan tingkat pencapaian 89,2% yang berkategori **BAIK**, maupun sub variabel kebijakan BDC dapat menjadikan UMKM menjadi lebih berkembang menjadi baik dengan capaian rata-rata skor 4,33 dan tingkat pencapaian sebesar 86,6% yang juga berkategori **BAIK**.

### Tepat Pelaksana

Pencapaian variabel Tepat Pelaksana (X2) juga berkategori BAIK karena rata-rata skor yang didapat adalah 4,2 dengan tingkat pencapaian 84,8%. Hal ini tentunya dapat disimpulkan bahwa menurut responden kebijakan BDC di Kabupaten Pangandaran sudah tepat pelaksana. Tepat pelaksana menurut Nugroho dalam bukunya *Public Policy* (2017 : 761) menyatakan:

*“Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya Pemerintah. Ada tiga Lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu Pemerintah, Kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi*

kebijakan yang diswastakan privatization atau contracting out)".

Berdasarkan hasil kuantitatif, responden menganggap kebijakan BDC di Kabupaten Pangandaran termasuk dalam kategori **BAIK** dengan tingkat capaian angka **84,8%**. Ini menunjukkan bahwa responden menilai bahwa pelaksana kebijakan BDC di Kabupaten Pangandaran sudah tepat dari mulai pemerintah daerah, konsultan pendamping sampai dengan Komite dan Pengelola BDC serta pihak swasta yang bekerjasama dengan komite BDC Kabupaten Pangandaran. Demikian halnya dengan hasil kualitatif dari penelitian tentang tepat pelaksana kegiatan BDC ini.

Berdasarkan data yang didapat dari lapangan Pemerintah Pusat dari sejak awal pelaksanaan BDC melakukan studi kelayakan terhadap beberapa calon lokasi termasuk di antaranya Kabupaten Pangandaran. Studi Kelayakan ini dilakukan oleh Konsultan Evaluasi yang dikontrak langsung oleh pemerintah pusat melalui DJCK KEMENPUPR, artinya pemerintah sudah bekerja sama dengan pihak swasta dalam rangka melakukan studi kelayakan calon lokasi pelaksanaan BDC di beberapa Kota/Kabupaten terpilih.

Dalam pelaksanaan kegiatan BDC, pemerintah pusat menyediakan stimulan dana BDI (Bantuan Dana Investasi) per Kota/Kabupaten terpilih untuk pelaksanaan BDC sebesar Rp. 2 Milyar di mana peruntukannya sesuai POB adalah untuk Biaya Operasional Komite dan Pengelola BDC, Biaya Pengembangan Kapasitas Pemda, Sewa Kantor, Peralatan Kantor, Biaya Tim Ahli Pengembangan Usaha BDC, dll Selain itu pemerintah pusat juga dalam pelaksanaan kegiatan BDC di daerah juga menunjuk konsultan pendamping di tingkat Kota/Kabupaten yang mendampingi Masyarakat sampai dengan tingkat Kelurahan.

Dengan demikian kebijakan tersebut dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat. Kemudian Pemerintah Daerah mendukung dengan menyediakan dana operasional sebesar minimal 5% dari total dana BDI dari Pemerintah Pusat pada saat awal pelaksanaan dan sesuai kemampuan daerah tiap tahunnya. Namun semenjak pandemic Covid 19 sampai dengan penyusunan penelitian ini Pemerintah

Daerah belum lagi menganggarkan biaya operasional kepada BDC disebabkan *refocusing* APBD yang dialihkan kepada penanganan dampak pandemi covid 19 di Kabupaten Pangandaran.

Dalam pelaksanaan BDC juga pemerintah pusat bekerja sama dengan masyarakat membentuk Komite dan Pengelola BDC yang akan menjadi institusi pelaksana kegiatan BDC di tingkat Masyarakat. Dalam hal kebijakan yang diswastakan salah satu contohnya adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan vokasi di mana pemerintah pusat memberikan dananya sedang pelaksanaan dilakukan oleh *provider* Lembaga pelatihan yang kompeten yang ditunjuk langsung oleh konsultan di tingkat provinsi melalui musyawarah dengan komite dan pengelola BDC dan pemerintah daerah.

Tepat pelaksana ini berdasarkan data - data di atas sudah terpenuhi di Kabupaten Pangandaran khususnya dalam implementasi kebijakan BDC. Pelaksana kebijakan BDC di Kabupaten Pangandaran tidak hanya terdiri dari unsur pemerintah semata tetapi juga Kerjasama dengan Masyarakat dan juga ada beberapa pelaksana kebijakan yang diswastakan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya Kerjasama dari berbagai unsur terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan BDC di Kabupaten Pangandaran.

### Tepat Target

Dalam hal variabel tepat target ada dua jenis respond yang berbeda dari responden dalam menilai sub-sub variabelnya. Dalam sub variable pemetaan dan pendataan pelaku usaha UMKM mendapatkan skor rata-rata 4,18 dan tingkat pencapaiannya 83,65 sehingga berkategori **BAIK** namun dalam pertanyaan tentang pendampingan terhadap UMKM untuk memenuhi kriteria ketepatan target oleh pelaksana BDC mendapatkan skor rata-rata 3,05 dengan tingkat pencapaian 61% dan termasuk berkategori **KURANG BAIK**, sehingga berpengaruh pada skor rata-rata tepat pelaksana yang hanya mencapai 3,6 dengan tingkat 72,3% dan hanya berkategori **CUKUP BAIK**.

Hal ini harus menjadi catatan bagi para pelaksana BDC di tingkat masyarakat baik dari unsur pemerintah daerah, konsultan pendamping maupun Komite dan Pengelola



BDC Kabupaten Pangandaran selain untuk perbaikan juga menunjukkan besarnya animo responden pada khususnya maupun pelaku usaha UMKM di Kabupaten Pangandaran pada umumnya sehingga berusaha sekuat tenaga untuk dapat memenuhi persyaratan agar dapat berperan aktif dalam fasilitasi BDC di Kabupaten Pangandaran.

Pelaksanaan kebijakan BDC sesuai dengan kebutuhan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)/UMKM yang ada di Kabupaten Pangandaran yang memiliki potensi dan propektif untuk dikembangkan sebagai hasil dari pembinaan sebelumnya melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Sementara institusi perumus kebijakan BDC adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang *core* kegiatannya adalah fokus pada infrastruktur dan perumahan akan dianggap kurang tepat namun karena BDC ini merupakan salah satu dari bagian program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di mana penanganan kawasan kumuh tidak hanya dilakukan melalui penataan wilayah juga pada SDMnya salah satunya melalui kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Apalagi kegiatan BDC diluncurkan pilotnya pada saat program KOTAKU masih bernama P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman) di mana salah satu elemen kegiatannya adalah peningkatan ekonomi Masyarakat yang tinggal di Kawasan kumuh tersebut.

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak. Sisi ketiga adalah, apakah kebijakan dibuat oleh Lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

### Tepat Lingkungan

Variabel Tepat Lingkungan mendapatkan respon BAIK dari responden dengan capaian rata-rata skor adalah 4,2 dan tingkat pencapaiannya sebesar 84,3%. Dengan demikian menurut responden variable tepat lingkungan turut berpengaruh baik pada

efektivitas kebijakan BDC dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Pangandaran. Seluruh sub variable dari Tepat Lingkungan dari mulai interaksi pelaksana BDC di tingkat masyarakat yaitu Komite dan Pengelola dengan UMKM binaannya mendapatkan rata-rata skor 4,5 dengan capaian 85% sehingga termasuk kategori BAIK. Demikian halnya Ketika responden ditanya tentang Pelaksanaan BDC juga memiliki rata-rata skor tinggi yaitu 4,3 dengan capaian 86% yang merupakan kategori BAIK. Responden pun memberikan respon yang baik ketika menjawab pernyataan tentang persepsi mereka akan manfaat BDC yaitu dengan rata-rata skor 4,1 dan capaian 82% yang juga termasuk dalam kategori BAIK.

Donald C Calista, "Policy Implementation" dalam Nugroho (2017 : 763 – 764) menyatakan tentang tepat lingkungan sebagai berikut:

*"Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait (variabel endogen) yaitu authoritative arrangement yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, network composition yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan baik dari pemerintah maupun masyarakat dan implementation setting yang berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Lingkungan kedua (variable eksogen) merupakan lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari public opinion yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan dan interpretive institution yang berkenaan interpretasi dari Lembaga – lembaga strategis dalam Masyarakat seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dan individuals yakni individu – individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam mengintegrasikan kebijakan dan implementasi kebijakan"*

Variabel **Tepat Lingkungan** dari hasil kuantitatif mendapatkan respon dalam kategori **BAIK** dari responden dengan tingkat pencapaian **84,3%**. Hal ini disebabkan karena cukup sering intensitas interaksi pelaksana

kebijakan BDC di Kabupaten Pangandaran dengan KSM/UMKM binaan baik melalui kunjungan lapangan maupun dengan mengundang mereka ke sekretariat BDC Kabupaten Pangandaran. Demikian halnya interaksi Pelaksana BDC dengan Lembaga terkait lainnya dalam rangka koordinasi dan diskusi tentang perkembangan pelaksanaan BDC di Kabupaten Pangandaran, bahkan dalam komite BDC sendiri anggotanya pun terdiri dari berbagai unsur baik dari masyarakat, pemerintah daerah maupun lembaga lain sehingga komunikasi dan interaksi tentang pelaksanaan BDC di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan baik. Demikian halnya opini Masyarakat tentang pelaksanaan BDC di Kabupaten Pangandaran cukup positif terutama dalam hal pengaruh pelaksanaan BDC terhadap perkembangan KSM/UMKM di Kabupaten Pangandaran.

Hasil kualitatif pun menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda, walaupun sempat terkendala dengan adanya pandemic covid 19. Secara umum hubungan kelembagaan terkait pelaksanaan BDC di Kabupaten Pangandaran baik pelaksana maupun Lembaga terkait lain baik dari unsur pemerintah daerah, media massa dan lainnya terbilang cukup baik di antaranya ditunjukkan dengan adanya Forum Musyawarah Kabupaten (FMK) yang secara rutin diselenggarakan dalam rangka msuyawarah tentang perkembangan kegiatan BDC di Kabupaten Pangandaran, Namun demikian terjadinya pandemic covid 19 sangat disayangkan berpengaruh pada hilangnya forum tersebut bahkan sampai dengan penelitian ini dilaksanakan Pemerintah Daerah masih fokus pada penanganan paska pandemic covid 19 dan baru mulai menyusun SK Bupati baru perihal penunjukkan Komite dan Pengelola BDC di Kabupaten Pangandaran yang telah habis masa berlakunya. Harapannya forum ini dapat kembali terlaksana secara rutin setelah komite dan pengelola BDC Kabupaten Pangandaran terpilih dan berkegiatan kembali.

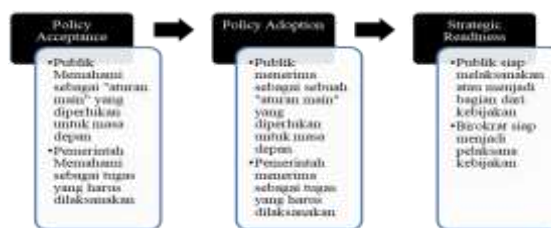
Forum Koordinasi dan Monitoring serta pendampingan oleh Komite dan Pengelola BDC kepada KSM/UMKM pun turut terpengaruh dengan kondisi ini sehingga perkembangan kegiatan BDC di Kabupaten Pangandaran menjadi menurun. Dengan disegerakannya

penerbitan SK Bupati yang baru diharapkan akan kembali menggerakkan roda kegiatan fasilitasi BDC di Kabupaten Pangandaran

### Tepat Proses

Untuk variabel proses secara rata-rata skor hanya mencapai 3,9 dengan capaian 77,8% yang termasuk dalam kategori CUKUP BAIK. Hal ini disebabkan tidak semua responden mengikuti dan berpartisipasi dalam semua model fasilitasi yang diberikan oleh BDC Kabupaten Pangandaran dengan berbagai sebab di antaranya responden hanya mengikuti dan berpartisipasi pada model fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka misalkan hanya memerlukan bahan baku, hanya ingin terlibat dalam pelatihan dan hanya ingin dibantu dalam pemasarannya dan lainnya. Penyebab lainnya bisa juga karena strategi dari pelaksana BDC baik Komite dan Pengelola BDC dan Konsultan pendamping dalam rangka pemerataan atau juga sesuai dengan kesiapan dan pemenuhan kriteria yang layak dari UMKM itu sendiri. Komite dan Pengelola BDC selalu melakukan verifikasi kelayakan dengan berdiskusi bersama Konsultan Pendamping yang pada akhirnya akan memutuskan mana yang layak mana yang tidak untuk mengikuti fasilitasi yang diselenggarakan oleh Komite dan Pengelola BDC baik itu pengadaan bahan baku, pelatihan, pemasaran, penyediaan alat produksi, mediasi dengan pihak ketiga dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.

Tepat yang terakhir atau kelima, menurut Nugroho (2017 : 154) adalah tepat proses seperti ditunjukkan pada bagan 4.5 berikut ini:



**Gambar. 2 Tepat Proses**

Sumber: Public Policy (Riant Nugroho (2017)

Variabel tepat proses dari hasil kuantitatif menunjukkan pelaksanaan BDC di Kabupaten Pangandaran **CUKUP BAIK** dengan

capaian **77,8%**. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai pelaksanaan BDC di Kabupaten Pangandaran prosesnya sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai harapan mereka walaupun diperlukan perbaikan dalam beberapa hal dalam rangka meningkatkan proses pelaksanaannya menjadi lebih baik lagi. Beberapa sub variable yang perlu tingkatkan lagi di antaranya adalah Kerjasama antar pelaksana kegiatan BDC dalam memberikan pemahaman tentang BDC kepada Masyarakat, perbaikan prosedur untuk mendapatkan fasilitasi BDC yang tidak terlalu memberatkan Masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan failitasi BDC dapat diperluas lagi di tingkat Masyarakat.

Dalam hal hasil dari penggalian data kualitatif pun mendukung hal yang sama tentang variable tepat proses. Hampir semua informan dengan didukung data sekunder menunjukkan bahwa pelaksanaan BDC di Kabupaten sudah tepat prosesnya dari mulai studi kelayakan sampai dengan pendampingan pelaksanaan kegiatan BDC. Perbaikan dan peningkatan di beberapa hal memang diperlukan dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik terutama setelah paska pandemik covid 19 cukup mengendurkan perjalanan pelaksanaan kegiatan BDC di

Kabupaten Pangandaran sehingga diperlukan langkah – langkah strategis agar kegiatan BDC di kabupaten Pangandaran kembali meningkat dan berjalan dengan baik.

### Pemberdayaan KSM/UMKM

Untuk data penelitian variable Y yaitu Pemberdayaan KSM/UMKM didapatkan hasil rata-rata nilai 4,1 dengan capaian 82,3% dengan demikian berkategori **BAIK**. Untuk sub-sub variabel dari Pemberdayaan KSM/UMKM ini hampir seluruhnya berkategori BAIK sesuai capaian TCRnya, seperti Peningkatan Keterampilan Usaha UMKM setelah Fasilitasi BDC mendapatkan rata-rata skor 4,22 dengan capaian 84,4%, Jejaring Usaha Bertambah setelah Fasilitasi BDC mendapatkan rata-rata skor dengan capaian 81,4% dan Peningkatan Pendapatan Setelah Mengikuti Kebijakan BDC mendapatkan rata-rata skor 4,3 dengan capaian 82,3%, hanya sub variable Kualitas Produk KSM/UMKM Meningkatkan setelah Fasilitasi BDC yang termasuk dalam kategori **CUKUP BAIK** karena rata-rata skor hanya 3,82 dan capainnya 77,2%, namun demikian mendekati kategori baik yang capaian minimalnya adalah 80%.

**Tabel 7. Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Pemberdayaan KSM/UMKM**

No	Pernyataan	Skor					N	Total Skor	Rata-rata Skor (MEAN)	TCR (%)	Kategori
		STS	TS	N	S	SS					
PEMBERDAYAAN KSM/UMKM (Y)											
1.	Keterampilan usaha UMKM meningkat setelah fasilitasi BDC	0	3	18	33	46	100	422	4,22	84,4	Baik
2.	Jejaring Usaha UMKM bertambah setelah mengikuti Fasilitasi BDC	0	10	13	37	40	100	407	4,07	81,4	Baik
3.	Kualitas Produk UMKM meningkat setelah Fasilitasi BDC (Perizinan, Legalitas, Merk, Hygiene, Legalitas, Kemasan, Variasi	0	10	20	44	26	100	386	3,86	77,2	Cukup Baik

	Produk)										
4.	Ada peningkatan pendapatan setelah mengikuti kebijakan BDC	0	0	5	60	35	100	430	4,3	86	Baik
	Pemberdayaan KSM/UMKM (Y)	0	23	56	174	147	400	1645	4,1	82,3	Baik

Sumber: Data Primer diolah

**KESIMPULAN**

Business Development Centre merupakan salah satu kegiatan dari Program P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2015 dengan pendekatan fasilitasi layanan kegiatan ekonomi terhadap KSM Ekonomi binaan program. Selanjutnya P2KKP bertransformasi menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan lebih fokus pada pendekatan fasilitasi infrastruktur masyarakat maka pendekatan fasilitasi terhadap BDC pun berubah menjadi fasilitasi infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan BDC Program Kotaku Dalam Memberdayakan UMKM termasuk kategori BAIK, dilihat dari aspek tepat proses, tepat target, tepat kebijakan dan tepat lingkungan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akdon & Ridwan (2013) *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabetika  
 Creswell, J. W. (2021). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.  
 Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press  
 Dye, T. R. (2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey : Pearson Education Inc.  
 Edward III, G. C. & Sharkansky. (1978) *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*. San Fransisco: W.H. Freeman and Company  
 Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung

Jamaluddin, A (2015) *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gaya Media  
 Kementerian Investasi/BKPM. (2022) *Upaya Pemerintah untuk Memajukan UMKM Indonesia. (2022)* Publikasi. Diakses dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>  
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya – Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. (2015) *Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Pilot Business Development Center (BDC)*. Jakarta  
 Keraf, K. K (2013) *Analisis Implementasi Kebijakan PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Lantuka*. Diakses dari <http://repository.ut.ac.id/1104/>  
 Manurung, Lismar (2007) *Reformasi Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Konseptual*. Nasion, *Jurnal Pusat Pengkajian Strategi Nasional*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2007. ISSN 1693-9409  
 Nugroho, Riant (2017) *Public Policy (Edisi Keenam)*. Jakarta: Elex Media Komputindo  
 Nugroho, Riant (2017) *Public Policy (Edisi Keenam)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.  
 Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; (2021) *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*  
 Yazfinedi, Widyaiswara Ahli Madya BBPPKS Regional I Sumatera. (2018); *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya; Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1